

# Budaya Politik, Partisipasi Politik dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia

Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M.Pd  
Dra. Neiny Ratmaningsih, M.Pd



## PENDAHULUAN

---

Di dalam modul ini akan dipelajari, budaya politik, dan partisipasi politik, dan Demokrasi sebagai sistem sosial politik Indonesia. dengan mempelajari modul ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip budaya politik.
2. Dapat menganalisis ciri-ciri dan bentuk budaya politik.
3. Dapat menganalisis nilai-nilai budaya politik masyarakat Indonesia.
4. Dapat memahami pengertian dan bentuk partisipasi politik.
5. Dapat menganalisis Demokrasi sebagai sistem sosial politik Indonesia.

Agar Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah dengan seksama bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahaminya, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Bacalah secara sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata yang Anda anggap penting. Carilah dan baca pengertian dari kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit (glosarium) yang terdapat dalam modul ini atau dalam kamus yang Anda miliki.
3. Selain belajar mandiri, tingkatkan pemahaman Anda melalui kegiatan diskusi, baik dalam kelompok belajar maupun pada saat mengikuti kegiatan tutorial.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Budaya Politik

Masyarakat tumbuh dan berkembang sebagai kelompok individu yang mendukung kebudayaan hasil karya dan warisan pendahulunya secara turun-temurun. Kompleksitas dari kebudayaan itu akan sangat tergantung pada kompleksitas masyarakat yang mendukungnya. Pada masyarakat modern, kebudayaan yang mereka dukung lebih kompleks bila dibandingkan dengan kebudayaan pada masyarakat sederhana.

Perilaku manusia dalam masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku politik, sedikit banyak akan ditentukan oleh pola orientasi yang dimiliki dan proses belajar yang dialami oleh seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, bahwa untuk memahami perilaku politik perlu pula memahami kebudayaan politik masyarakatnya.

**A. BUDAYA POLITIK**

Salah satu wujud budaya akan tercermin dalam pola hubungan yang terjadi antara individu (anggota kelompok) yang satu dengan yang lainnya, antara individu dengan kelompoknya, dan antara kelompok dengan kelompok. Pola hubungan dalam sistem politik masyarakat tertentu itu dinamakan “Budaya Politik”, (*Political Culture*). Yang dimaksud dengan budaya politik adalah pola tingkah laku, sebagaimana dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (1983 : 29), bahwa:

*“Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu inheren (melekat) pada setiap masyarakat, yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern ....”*

Pengertian *political culture* (budaya politik) menurut Almond dan Verba, (1990:20). adalah bagaimana seseorang memiliki orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik yang tercermin dalam sikap dan perilaku politiknya. Pengertian budaya politik menunjuk kepada suatu sikap orientasi yang khas warga

negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu

Lebih lanjut menurut *Almond dan Verba*, warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan alat kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik. Dari sinilah akan dapat dilihat pola orientasi dari tiap warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik.

Orientasi warga negara tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik secara umum, aspek-aspek input dan output, serta kepada sejumlah pribadi sebagai aktor politik.

*Orientasi kognitif* warga negara menunjuk kepada pengetahuan dan kepercayaan atas politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan output-nya. Orientasi ini lebih menunjuk kepada sejauh mana pemahaman seseorang terhadap sistem politik maupun perilaku para aktor politik, kebijakan yang diambil oleh tokoh politik, serta implikasinya terhadap kepentingan dirinya.

Sedangkan *orientasi afektif* menunjuk kepada perasaan terhadap sistem politik; peranan, para aktor, dan penampilan. Dilihat dari aspek ini, maka seseorang dimungkinkan untuk memiliki perasaan subyektif tertentu terhadap berbagai aspek dari sistem politik, sehingga ia dapat menerima ataupun menolak sistem politik itu pada bagian tertentu maupun sistem politik secara keseluruhan.

*Orientasi evaluatif* menunjuk kepada keputusan dan pendapat warga negara tentang obyek-obyek politik berdasarkan apa yang ia ketahui dan ia rasakan terhadap sistem politik maupun perilaku aktor-aktor politiknya. Keputusan dan pendapat seseorang mengenai sistem politik ini ditentukan oleh kemampuannya dalam menilai moralitas politik, pengetahuan, dan cara-cara mereka dalam membuat penilaian politik, serta dalam menyampaikan pendapat.

Pendapat lain dikemukakan oleh *Albert Widjaja* dalam Tesisnya “Kultur Politik elit Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia”, bahwa: “Kultur politik mempunyai kesamaan dengan lain kebudayaan masyarakat. Kultur politik adalah tindak budaya, sistem nilai dan keyakinan yang berhubungan dengan proses kehidupan politik, seperti legitimasi, program partai politik, kebijaksanaan pemerintah, perilaku pejabat

dan lain-lain (Prisma : 1980). *Albert Widjaja* juga memberikan rincian mengenai ciri-ciri kultur politik, yaitu:

1. Biasanya berpijak pada norma pokok.
2. Biasanya tertanam pada perasaan orang (tidak hanya pada intelegnya).
3. Umumnya dibentuk oleh tokoh masyarakat atau penguasa lebih dulu lalu diwariskan pada masyarakat melalui media massa, lingkungan kerja/sosial politik dalam pergaulan dan keluarga.

Kultur politik atau budaya politik tidak hanya dijumpai pada kelompok masyarakat yang berskala besar, tetapi juga terdapat dalam setiap kelompok masyarakat berskala kecil. Juga tidak hanya terdapat pada masyarakat modern, tetapi juga pada masyarakat tradisional. Namun akan lebih tampak pada masyarakat modern, sebab pada masyarakat modern ini orang akan sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh dan proses politik. Sebagaimana pendapat *Arbi Sanit* (1983 : 3), bahwa:

*“Di masa modern ini hampir dapat dipastikan bahwa tak seorang pun dapat melepaskan diri dari pengaruh politik. Seseorang dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Setidaknya salah satu dari bentuk proses politik seperti, konflik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan dan tawar-menawar politik, mempengaruhi seseorang dalam waktu tertentu”.*

Setiap orang anggota suatu sistem politik tidak bisa tidak dia akan mendukung salah satu budaya politik yang dikukuhkan tadi. Dalam keadaan aktif ataupun diam, dalam lingkup yang luas ataupun sempit. Budaya politik itu selalu didapati dengan tipe-tipe yang telah diinventarisir oleh ahli-ahli politik seperti berikut:

1. Budaya politik Parokhial (*Parochial Political Culture*).
2. Budaya politik Kaula (*Subject Political Culture*).
3. Budaya Politik Partisipan (*Partisipan Political Culture*)

Untuk selanjutnya pembahasan difokuskan hanya pada budaya politik “Kaula” (*Subject Political Culture*), yang memberikan strata terhadap masyarakat menjadi dua kelompok yakni kelompok terendah dan kelompok tertinggi. Pengertian yang lengkap tentang budaya politik kaula, dikemukakan oleh *Rusadi Kantaprawira*, (1983 : 37), sebagai berikut:

*“..... Budaya politik Kaula, yaitu di mana anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output-nya. Sedangkan perhatian (yang frekuensinya sangat rendah) atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap output-nya. Posisi sebagai Kaula, pada pokoknya dapat dikatakan sebagai posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya.*

Pembahasan yang lebih umum diungkap oleh *Gabriel A. Almond dan Sidney Verba* (1984 : 21), bahwa di dalam budaya politik kaula terdapat kecenderungan seperti berikut:

*“Di sini terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tapi frekuensi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif, mendekati nol. Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut; mereka mungkin menunjukkan kebanggaan terhadap sistem itu, atau mungkin tidak menyukainya, dan tapi hubungannya terhadap sistem secara umum, dan terhadap output, administratif. Sistem politik itu secara esensial adalah hubungan yang bersifat pasif, walaupun ada bentuk kompetensi yang terbatas yang tersedia di dalam kebudayaan subjek”.*

Sesungguhnya tipe-tipe budaya politik pada umumnya dan budaya politik “kaula” khususnya, selalu bersentuhan satu sama lain, sehingga dijumpai tipe-tipe lain yang merupakan campuran antara ketiga budaya politik orisinil yang ada. Tipe-tipe campuran itu adalah:

1. *Parochial ~Subject Culture*
2. *Subject ~ Partisipant Culture*
3. *Parochial ~Partisipant Culture*

Kesatuan antara tipe yang satu dengan yang lain, tampak pada kehidupan politik negara-negara berkembang yang menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Dalam kehidupan politik Indonesia yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi Pancasila akan didapati tipe campuran budaya kaula ~partisipasi atau parokhial ~ kaula.

Terutama pada masyarakat pedesaan, tipe campuran yang lebih jelas terlihat adalah parokhial ~ kaula, sebab kondisi dan alam pikiran masyarakat pedesaan lebih memungkinkan untuk terjadinya hal itu. Seperti diilustrasikan oleh *Rusadi Kantaprawira* (1983 : 41), bahwa:

*Budaya Indonesia yang bersifat parokhial ~ kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, disatu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari hubungan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial. Sedang di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern (barat), kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab integrasi, seperti: agama, kesukuan, dan lain-lain.*

Ciri-ciri budaya politik Indonesia yang parokhial ~ kaula dan kaula~partisipasi itu antara lain adalah masih kukuhnya sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Pertumbuhan dan perkembangan budaya politik ini ada keselarasan dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada *output* dari penguasa.

## **B. PERILAKU POLITIK**

Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Ramlan Surbakti (1992 : 131), mengemukakan bahwa perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu (Fadillah Putra, 2003 : 200). Sedangkan sikap politik merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Perilaku politik atau (Inggris:*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Contoh perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

Perilaku politik merupakan tingkah laku politik para aktor politik dan warganegara atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Aktor politik ada dua macam :

- a. Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.
- b. Warga negara biasa yang memiliki hak serta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin.

**Macam-macam perilaku politik :**

- a. Radikal : adalah perilaku tidak puas warganegara terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak kenal kompromi dan tidak menginginkan orang lain cenderung ingin menang sendiri.
- b. Moderat : adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal.
- c. Status Quo : adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada/berlaku dan berusaha tetap mempertahankan keadaan itu.
- d. Konservatif : adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan.
- e. Liberal : adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus. Menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan.

Kajian terhadap perilaku politik dapat kita pilih tiga kemungkinan unit analisis yaitu, 1). Individu sebagai aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa, 2). Agregasi politik ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti misalnya kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa dan 3). Tipologi kepribadian politik, ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelis, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik seringkali dapat dijelaskan dengan sudut pandang psikologis di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Dan di sini, diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan



tersebut. Maka menurut model ini terdapat empat faktor yang memberikan pengaruh terhadap perilaku politik seorang aktor politik (Smith, 1968: 25; *Surbakti*, 2010: 169)

*Pertama*, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.

*Kedua*, lingkungan sosial politik langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, kelompok pergaulan dan sekoiah. Dan lingkungan sosial politik langsung seorang aktor akan mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya.

*Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu “kepentingan”, “penyesuaian diri”, “eksternalisasi dan pertahanan diri”.

*Keempat*, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang memberikan pengaruh terhadap aktor secara langsung ketika hendak melakukan sesuatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Diskusikan tentang dasar pengertian budaya politik!
- 2) Diskusikan tentang ciri-ciri budaya politik!
- 3) Diskusikan tentang tipe-tipe budaya politik!
- 4) Diskusikan tipe-tipe campuran budaya politik!
- 5) Diskusikan apa yang dimaksud dengan perilaku politik!
- 6) Diskusikan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku politik!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pola hubungan dalam sistem politik masyarakat tertentu dinamakan budaya politik, yaitu budaya politik dalam pola tingkah laku, individu

dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Istilah budaya politik melekat pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern.

- 2) Ciri-ciri budaya politik, yaitu: Biasanya berpijak pada norma pokok, biasanya tertanam pada perasaan orang (tidak hanya pada intelegnya), umumnya dibentuk oleh tokoh masyarakat atau penguasa lebih dulu lalu diwariskan pada masyarakat melalui media massa, lingkungan kerja/sosial politik dalam pergaulan dan keluarga.
- 3) Budaya politik Parokhial (Parochial Political Culture), budaya politik, kaula (Subject Political Culture), budaya Politik Partisipan (Partisipan Political Culture).
- 4) Tipe-tipe campuran itu adalah: Parochial – Subject Culture, Subject Partisipan Culture, Parochial – Partisipan Culture, Civil Culture.
- 5) Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik
- 6) empat faktor yang memberikan pengaruh terhadap perilaku politik seorang aktor politik Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, Kedua, lingkungan sosial politik langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu, Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi



## RANGKUMAN

---

Untuk selanjutnya silakan Anda simak dan kaji rangkuman materi pembelajaran tentang Budaya Politik dan perilaku politik.

Budaya politik adalah tindak budaya, sistem nilai, dan keyakinan yang berhubungan dengan proses kehidupan politik, seperti legitimasi, program partai politik, kebijaksanaan pemerintah, perilaku pejabat, dan lain-lain.

Di masa modern ini hampir dapat dipastikan bahwa tak seorang pun dapat melepaskan diri dari pengaruh politik. Seseorang dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Setidaknya salah satu dari bentuk proses politik seperti, konflik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan dan tawar-menawar politik, mempengaruhi seseorang dalam waktu tertentu.

Tipe-tipe budaya politik yang telah diinventarisir oleh ahli-ahli politik yakni:

1. Budaya politik Parokhial (*Parochial Political Culture*).
2. Budaya politik Kaula (*Subject Political Culture*).
3. Budaya Politik Partisipan (*Partisipan Political Culture*)

Selain itu juga dijumpai tipe-tipe lain yang merupakan campuran antara ketiga budaya politik orisinal yang ada. Tipe-tipe campuran itu adalah:

1. *Parochial ~Subject Culture*
2. *Subject ~ Participant Culture*
3. *Parochial ~Partisipan Culture*

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu ( Fadillah Putra, 2003 : 200 ). Sedangkan sikap politik merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.



### TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pola hubungan dalam sistem politik masyarakat tertentu dinamakan ....
  - A. kesadaran politik
  - B. budaya politik
  - C. sosialisasi politik
  - D. partisipasi politik
  
- 2) Dalam kehidupan budaya politik terdapat sistem politik yang bersifat ....
  - A. tradisional
  - B. modern
  - C. tradisional-modern
  - D. modern-modern

- 3) Di bawah ini merupakan ciri-ciri kultur politik, *kecuali* ....
  - A. berpijak pada norma politik
  - B. biasanya tertanam pada perasaan
  - C. biasanya ide dari luar daerah
  - D. dibentuk oleh tekad masyarakat dengan penguasa
  
- 4) Mereka yang menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi mengubah sistem dan menyerah kepada segala kebijaksanaan penguasa disebut budaya politik ....
  - A. parokhial
  - B. kaula
  - C. partisipan
  - D. parakhial dan kaula
  
- 5) Orientasi Warga Negara yang menitikberatkan pada sejauh mana pemahaman seseorang terhadap sistem politik maupun perilaku para aktor politik, kebijakan yang diambil oleh tokoh politik, serta implikasinya terhadap kepentingan dirinya merupakan orientasi :
  - A. Kognitif
  - B. Afektif
  - C. Psikomotor
  - D. Evaluatif
  
- 6) Pada system demokrasi Pancasila didapati tipe campuran budaya politik:
  - A. Kaula - Primordial
  - B. Kaula – Patrimonial
  - C. Kaula – Partisipan
  - D. Kaula - Pancasila
  
- 7) Perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Pendapat ini dikemukakan oleh :
  - A. Fadillah Putra
  - B. Ramlan Surbakti
  - C. Albert Wijaya
  - D. Rusadi Kantaprawira
  
- 8) Berikut yang bukan merupakan contoh dari perilaku politik adalah :
  - A. Memilih wakil rakyat
  - B. Menjadi anggota suatu partai politik
  - C. Bersikap konsumerisme
  - D. Mengkritik pemerintah

- 9) Sikap dan perilaku masyarakat yang berpikiran bebas, ingin maju, menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan, merupakan perilaku politik:
- A. Radikal
  - B. Moderat
  - C. Status Quo
  - D. Liberal
- 10) Berikut yang merupakan tipologi kepribadian politik adalah:
- A. Aktivitas politik
  - B. Individu sebagai Warganegara biasa
  - C. Pemimpin otoriter
  - D. Birokrasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Partisipasi Politik

## A. PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik berarti keterlibatan seseorang/kelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Di dalam keterlibatannya itu, seseorang atau sekelompok orang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih jelas lagi para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi-definisi partisipasi politik sebagai berikut:

1. *Herbert Mc. Closky* dalam *internasional Encyclopedia of The Social Science*, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara/masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau - tidak, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
2. *Norman H. Nie Sidney Verba* dalam *Handbook of Political Science*, Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
3. *Samuel P. Huntington* dan *Joan M. Nelson*, Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap dan sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.
4. *Miriam Budiardjo* (1982 : 1-2)

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan jalan memilih pemimpin negara baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan-kegiatan yang semacam ini dapat terlihat dari kegiatan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat-rapat umum(kampanye), menjadi anggota suatu partai politik atau sekelompok kepentingan ataupun mengadakan hubungan dengan

pejabat-pejabat pemerintah ataupun juga bias anggota parlemen dan sebagainya sejenis dengan itu.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik di atas, terdapat hal-hal substantif yang berkenaan dengan partisipasi tersebut, yaitu :

1. Kegiatan-kegiatan nyata, yakni kegiatan-kegiatan yang bias diamati secara kasat mata, bukan sikap atau orientasi.
2. Bersifat sukarela, yakni kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan digerakkan oleh pihak lain di luar yang melakukan partisipasi, seperti baying-bayang pihak pemerintah, desakan, dan manipulasi.
3. Dilakukan oleh warganegara atau masyarakat biasa, baik individu-individu maupun kelompok masyarakat;
4. Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan/ atau mencari jabatan politik; dan
5. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi politik.

Dengan demikian partisipasi politik pada dasarnya adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kegiatan politik secara aktif sesuai dengan aturan main yang berlaku. Pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, tetapi kadar dari partisipasinya tersebut mungkin berbeda-beda dan hal ini akan tergantung pada pengetahuan/kesadaran tentang politik dari setiap warga masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh *Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson* (1990 : 1), bahwa:

*“Di dalam masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan unsur satu golongan elit yang kecil. Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian dari penduduk yang paling besar menyadari atau tidak bagaimana tindakan-tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah”.*

Uraian tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya pada suatu masyarakat yang masih tradisional kebanyakan dari mereka tidak mengerti bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan politik. Padahal sebenarnya

mereka sudah berpartisipasi. Misalnya ikut serta dalam suatu kegiatan pemilihan umum, tetapi mereka tidak menyadari dan hanya tahu bahwa hal tersebut merupakan suatu keharusan. Oleh sebab itu, *Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson* (1990 : 9), selanjutnya mengemukakan:

*“Partisipasi politik mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Yang pertama dinamakan partisipasi politik yang dimobilisasikan”.*

Dalam suatu negara yang demokratis, apabila masyarakatnya sudah berpartisipasi atas kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai partisipasi politik yang cukup tinggi tingkatannya dan mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Sebaliknya jika suatu masyarakat berpartisipasi dalam bidang politik tetapi seolah-olah seperti dipaksa karena merupakan suatu keharusan yang dimobilisasi, maka terdapat kecenderungan bahwa masyarakat tersebut masih rendah tingkat pengetahuannya tentang masalah politik dan ada kemungkinan tidak akan ada kemajuan dalam partisipasi politiknya.

Apabila kemungkinan yang kedua yaitu rendahnya partisipasi politik masyarakat yang masih terdapat di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya-upaya agar partisipasi masyarakat mengalami kemajuan, sebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat mempunyai dampak yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintah berupa dukungan dan dorongan serta tuntutan terhadap penyelenggara pemerintah. Apabila dukungan lebih banyak dari pada tuntutan, maka penyelenggaraan pemerintah akan semakin baik dan mantap. Untuk itu, peningkatan partisipasi politik baik dalam jumlah, bentuk maupun kualitasnya yang mendukung jalannya kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara perlu mendapat perlindungan hukum berupa penegasan tentang kepastian penegakan hukum yang berlaku, dan adanya wadah untuk menyalurkan kehendak politik masyarakat. Dengan demikian tidak akan terjadi keresahan dalam masyarakat sebagai akibat tidak tersalurkannya atau tidak tertampungnya partisipasi politik masyarakat.

*Alfian* (1986:225) berasumsi bila tidak adanya partisipasi politik yang sehat dari masyarakat dalam suatu sistem politik, maka manipulasi politik



dari berbagai golongan akan mengalami peningkatan dan hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem politik tersebut. Apabila asumsi tersebut benar, selanjutnya Alfian berpendapat sebagai berikut:

*“Kalau asumsi ini mempunyai unsur-unsur kebenaran, maka partisipasi aktif anggota-anggota masyarakat dalam politik bisa bertindak sebagai mekanisme dalam mengendalikan (mekanisme pengontrol) manipulasi - manipulasi politik sehingga bisa menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik secara stabil dan dinamis”. (1986 : 225).*

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik yang sehat dari masyarakat adalah sangat perlu untuk menjaga stabilitas suatu sistem politik. Sehat atau tidaknya suatu partisipasi politik adalah sangat relatif, sebab hal ini sangat tergantung pada sistem politik yang ada dukungan dari masyarakat terhadap sistem politik tersebut.

## **B. BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK**

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990 : 16-17), partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Kegiatan pemilihan mencakup bukan hanya suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakannya bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahanya dalam kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam.
4. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan

maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

5. Tindakan kekerasan (violence) juga dapat merupakan bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

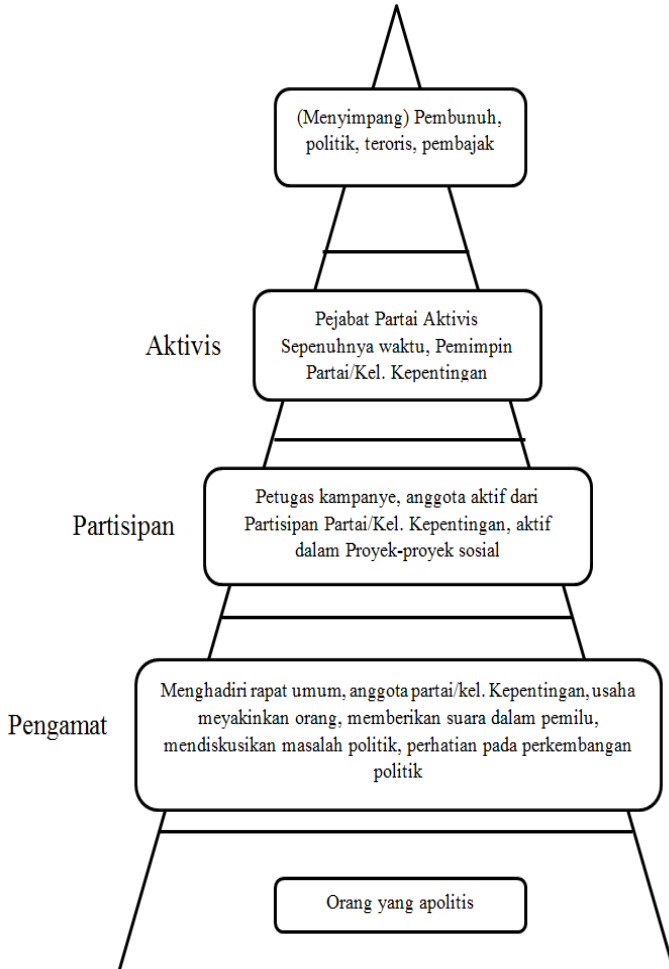
Berbagai bentuk partisipasi pada praktiknya tidak selalu berjalan lancar. Selain disebabkan kapasitas individu atau kelompok dalam masyarakat yang berbeda, misalnya kesadaran politik atau faktor-faktor lain yang berpengaruh kepada kesadaran politik tersebut, juga seringnya muncul kekhawatiran dari penguasa (elite politik) akan lahirnya partisipasi politik yang kurang atau tidak sehat.

Menurut *Robert Lane* sebagaimana dikutip *Michael -Rush* dan *Phillip Althoff* (1990 : 181-182) dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik dapat memenuhi empat macam fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memenuhi suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

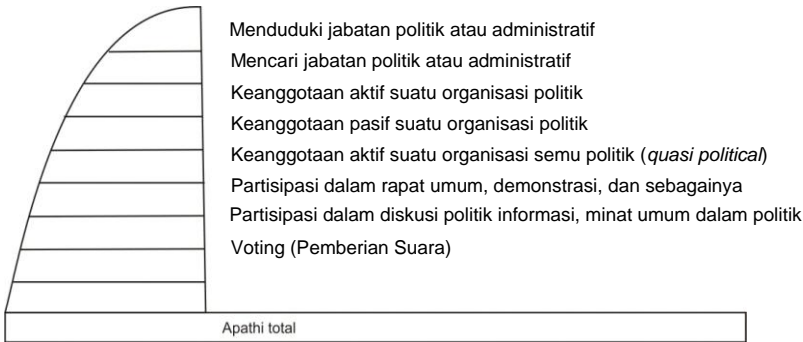
Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, jumlah orang yang aktif sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik adalah kecil sekali. Dan kelompok dari orang-orang tersebut dikatakan sebagai aktivis politik, antara lain sebagai pimpinan partai politik atau kelompok kepentingan.

Sebagai gambaran, perhatikan piramida partisipasi politik sebagai berikut:



Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson, 1980

Michael Rush dan Phillip Althoff (1990 : 124) mengemukakan beberapa tipe atau bentuk dari partisipasi politik dalam suatu hierarki, sebagai berikut:



Lain halnya dengan Milbrath M.L. Goel, ia memasukkan segala aksi atau bentuk aktivitas yang berhadapan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan kepada partisipasi politik, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, dari bentuk-bentuk yang mengedepankan kondisi damai sampai tindakan-tindakan kekerasan. Bentuk-bentuk tersebut diidentifikasi pada tujuh bentuk aksi politik individual:

1. *Apathetic Inactives*: tidak beraktivitas yang partisipatif, tidak pernah memilih;
2. *Passive Supporters*: memilih secara regular/teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”;
3. *Contact Specialist*: pejabat menghubungi lokal (daerah) , provinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu;
4. *Communicators*: mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pimpinan-pimpinan politik;
5. *Party and campaign workers*: bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbangkan uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih menjadi kandidat partai politik;
6. *Community activists*: bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani masalah-masalah lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial;

7. *Protester*; bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadapi pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi aturan.

Berkenaan dengan beragamnya bentuk dan tingkatan partisipasi politik di atas, Gabriel A. Almond telah membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk aksi, yaitu partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern. Sementara bentuk nonkonvensional adalah kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan (*violence*) dan revolusioner (Mochtar Mas’oed dan MacAndrew, 1995: 48). Adapun bentuk-bentuknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemberian Suara</li> <li>● Diskusi Politik</li> <li>● Kegiatan kampanye</li> <li>● Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan</li> <li>● Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengajuan petisi</li> <li>● Berdemonstrasi/unjuk rasa</li> <li>● Konfrontasi</li> <li>● Mogok</li> <li>● Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran)</li> <li>● Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)</li> <li>● Perang Gerilya</li> </ul>

Sumber: Gabriel A. Almond dalam Mas’oed dan MacAndrews, 1993:47.

Untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, yang merupakan bagian dari partisipasi politik dapat diperoleh melalui perekrutan politik yang di dalamnya meliputi dua cara yang khusus, yaitu seleksi pemilihan melalui ujian dan seleksi pemilihan melalui latihan. Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka itu dibedakan dari partisipasi-partisipasi politik yang lainnya, dalam hal ini bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan yang sesungguhnya, atau pelaksanaan pengaruh oleh individu-individu atau kelompok-kelompok lain dalam sistem politik.

Di bawah para pemegang atau pencari jabatan di dalam sistem politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari berbagai tipe organisasi politik atau semua politik. Hal ini terdapat dalam semua tipe dari sistem politik dan kelompok kepentingan. Dari sudut pandang sistem politik terdapat persamaan antara kelompok kepentingan dengan partai politik, keduanya dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik yaitu suatu organisasi yang di dalamnya anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik antara lain berupa usaha untuk mempertahankan gagasan, posisi, situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu, melalui sistem yang ada dalam organisasi tersebut.

Selain terdapat persamaan juga terdapat perbedaan yang mendasar antara partai politik dengan kelompok kepentingan, yaitu dalam hal sikap, kelompok kepentingan adalah organisasi yang berusaha memajukan, mempertahankan atau mewakili spektrum yang lebih luas dari pada sikap, selain itu golongan kelompok kepentingan mempunyai tujuan yang terbatas seperti pencabutan atau modifikasi (perubahan) terhadap undang-undang atau peraturan tertentu, dan perlindungan terhadap *interest* suatu kelompok masyarakat, dan kelompok kepentingan berhenti beroperasi apabila tujuannya telah tercapai. Mengenai jenis-jenis partisipasi politik, *Jeffery M. Paige* mengemukakan empat macam partisipasi politik yang kemudian dikutip oleh *Alfian* (1986 : 255-257), sebagai berikut:

1. Tipe partisipasi yang pertama kalau pengetahuan/kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan mereka terhadap sistem politik juga tinggi, maka mereka akan berpartisipasi secara aktif. Partisipasi mereka itu sehat karena mereka loyal dan mendukung sistem politik yang ada.
2. Tipe partisipasi yang kedua terjadi kalau pengetahuan/kesadaran politik yang tinggi dibarengi oleh kepercayaan rendah terhadap sistem politik yang berlaku. Suasana ini mengundang adanya sikap dan tingkah laku yang tampak membangkang (*dessident*), disertai sikap kurang atau tidak responsif dari mereka yang berkuasa dalam sistem politik itu.
3. Tipe mereka yang berkuasa dalam sistem politik ketiga terjadi bila pengetahuan/kesadaran politik yang rendah berkaitan dengan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem politik. Dalam suasana seperti ini, masyarakat memang tidak aktif berpolitik, tetapi secara diam-diam mereka dapat menerima sistem politik yang berlaku. Tipe ini biasanya terjadi dalam sistem politik yang tradisional.

4. Macam partisipasi politik yang keempat muncul bilamana pengetahuan/kesadaran politik yang rendah bertalian dengan kepercayaan yang rendah pula terhadap sistem politik. Dalam hal ini, walaupun masyarakat bersikap pasif namun dalam kepasifannya itu mereka tertekan, terutama oleh karena perlakuan yang mereka anggap sewenang-wenang dari penguasa.

Berdasarkan tipe-tipe partisipasi politik tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik sesuai dengan intensitas kegiatan yang dilakukan dalam masalah politik. Akan tetapi banyaknya tingkatan partisipasi dalam setiap sistem politik adalah tidak sama, beberapa tingkatan partisipasi politik mungkin tidak terdapat dalam beberapa sistem politik. Tidak semua sistem politik memiliki sistem pemilihan, beberapa sistem sangat membatasi dan melarang rapat-rapat umum serta demonstrasi, dan sebagainya.

Partisipasi politik itu sangat bervariasi. Mengenai hal ini *Milbrath* mengemukakan empat faktor yang berkaitan dengan variasi dari partisipasi politik yang dikutip oleh *Michael Rush* dan *Phillip Althoff* (1990 : 167), sebagai berikut:

1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik.
2. Karakteristik pribadi seseorang.
3. Karakteristik sosial seseorang.
4. Keadaan politik/lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri.

Semakin peka atau terbuka seseorang terhadap perangsang politik lewat kontak pribadi, organisator, atau lewat media massa, maka besar kemungkinannya orang tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan politik.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Diskusikan berbagai pengertian dan definisi partai politik!
- 2) Diskusikan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu negara yang demokratis!

- 3) Diskusikan bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson!
- 4) Diskusikan piramida partisipasi politik
- 5) Diskusikan beberapa tipe atau bentuk partisipasi politik dalam suatu hierarki!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) a. Herbert Mc. Closky dalam *internasional Encyclopedia of The Social Science*, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara/masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
  - b. Norman H. Nie Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*, Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
  - c. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap dan sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.
- 2) Dalam suatu negara yang demokratis, apabila masyarakatnya sudah berpartisipasi atas kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai partisipasi politik yang cukup tinggi tingkatannya dan mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Sebaliknya jika suatu masyarakat berpartisipasi dalam bidang politik tetapi seolah-olah seperti dipaksa karena merupakan suatu keharusan yang dimobilisasi, maka terdapat kecenderungan bahwa masyarakat tersebut masih rendah tingkat pengetahuannya tentang masalah politik dan ada kemungkinan tidak akan ada kemajuan dalam partisipasi politiknya.
- 3) a. Kegiatan pemilihan mencakup bukan hanya suara akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja, dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakannya bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
  - b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin



- politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahanya dalam kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam.
  - d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan bisanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
  - e. Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.
- 4) Aktivis, pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Partisipan, tugas kampanye, anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial. Pengamat, menghadiri rapat umum, anggota partai/kelompok kepentingan.
  - 5) Menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik, Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*), Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
    - a. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik.
    - b. Voting (pemberian suara).



## RANGKUMAN

---

Pada dasarnya pada suatu masyarakat yang masih tradisional kebanyakan dari mereka tidak mengerti bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan politik. Padahal sebenarnya mereka sudah berpartisipasi. Misalnya ikut serta dalam suatu kegiatan pemilihan umum, tetapi mereka tidak menyadari dan hanya tahu bahwa hal tersebut merupakan suatu keharusan.

Partisipasi politik yang sehat dari masyarakat adalah sangat perlu untuk menjaga stabilitas suatu sistem politik. Sehat atau tidaknya suatu partisipasi politik adalah sangat relatif, sebab hal ini sangat tergantung pada sistem politik yang ada dukungan dari masyarakat terhadap sistem politik tersebut.

Partisipasi politik dapat memenuhi empat macam fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memenuhi suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bahwa sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Empat macam partisipasi politik:

1. Tipe partisipasi yang pertama kalau pengetahuan/kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan mereka terhadap sistem politik juga tinggi, maka mereka akan berpartisipasi secara aktif. Partisipasi mereka itu sehat karena mereka loyal dan mendukung sistem politik yang ada.
2. Tipe partisipasi yang kedua terjadi kalau pengetahuan/kesadaran politik yang tinggi dibarengi oleh kepercayaan rendah terhadap sistem politik yang berlaku. Suasana ini mengundang adanya sikap dan tingkah laku yang tampak membangkang (*dessident*), disertai sikap kurang atau tidak responsif dari mereka yang berkuasa dalam sistem politik itu.
3. Tipe mereka yang berkuasa dalam sistem politik ketiga terjadi bila pengetahuan/ kesadaran politik yang rendah berkaitan dengan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem politik. Dalam suasana seperti ini, masyarakat memang tidak aktif berpolitik, tetapi secara diam-diam mereka dapat menerima sistem politik yang berlaku. Tipe ini biasanya terjadi dalam sistem politik yang tradisional.
4. Macam partisipasi politik yang keempat muncul bilamana pengetahuan/kesadaran politik yang rendah bertalian dengan kepercayaan yang rendah pula terhadap sistem politik. Dalam hal ini, walaupun masyarakat bersikap pasif namun dalam kepasifannya itu mereka tertekan, terutama oleh karena perlakuan yang mereka anggap sewenang-wenang dari penguasa.

**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal yang bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat dengan tindakan-tindakannya. Pengertian tersebut dikemukakan oleh ....
  - A. Samuel P. Huntington
  - B. Norman H. Nie Sidney Verba
  - C. Joan M. Nelson
  - D. Herbert McClosky
  
- 2) Pada dasarnya dalam masyarakat yang kebanyakan tidak mengerti bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah ....
  - A. masyarakat tradisional
  - B. masyarakat modern
  - C. masyarakat monoloyalitas
  - D. masyarakat majemuk
  
- 3) *Alfian* (1986:225) berasumsi Apabila tidak adanya partisipasi politik yang sehat dari masyarakat dalam suatu sistem politik, maka manipulasi politik dari berbagai golongan akan mengalami peningkatan dan hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem politik tersebut. Pendapat inidikemukakan oleh.....
  - A. Miriam Budiarto
  - B. Herbert McClosky
  - C. Alfian
  - D. Samuel P. Huntington
  
- 4) Di bawah ini yang bukan merupakan indikator piramida partisipasi politik dalam level aktivis, adalah....
  - A. menghadiri rapat umum
  - B. pemimpin partai
  - C. pejabat partai
  - D. kelompok kepentingan
  
- 5) Bentuk partisipasi politik yang mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
  - A. Kegiatan mencari koneksi

- B. Lobbying
  - C. Kegiatan organisasi
  - D. Kegiatan pemilihan
- 6) Di bawah ini yang bukan merupakan variasi dari partisipasi politik, adalah....
- A. karakteristik pribadi seseorang
  - B. karakteristik sosial seseorang
  - C. keadaan politik
  - D. rekrutmen politik
- 7) *Robert Lane* sebagaimana dikutip *Michael -Rush* dan *Phillip Althoff* (1990 : 181-182) dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa Partisipasi politik dapat memenuhi empat macam fungsi sebagai berikut:
- 1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
  - 2. Sebagai sarana untuk memenuhi suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
  - 3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
  - 4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.
- Pendapat ini dikemukakan oleh.....
- A. Herbert McClosky
  - B. Robert Lane
  - C. Samuel P. Huntington
  - D. Norman H. Nie Sidney Verba
- 8) Mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pimpinan-pimpinan politik, merupakan salah satu bentuk aksi politik individual yang disebut.....
- A. *Communicators*
  - B. *Protester*
  - C. *Commonity activists*
  - D. *Passive Supporters*
- 9) Kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik yang bersifat non-konvensional adalah....
- A. Pemberian suara
  - B. Diskusi politik
  - C. Kegiatan kampanye
  - D. Berdemonstrasi

- 10) Berikut yang bukan merupakan factor yang berkaitan dengan variasi dari partisipasi politik menurut *Milbrath* adalah.....
- A. Sejauh mana orang menerima perangsang politik.
  - B. Karakteristik materialistis seseorang.
  - C. Karakteristik sosial seseorang.
  - D. Keadaan politik/lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Demokrasi Sebagai Sistem Sosial dan Politik Indonesia

### A. PEMIKIRAN TENTANG DEMOKRASI

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Konsep pokok demokrasi, sudah lama digagas oleh para pemikir atau filosof Yunani Kuno. Salah satunya adalah *Arsitoteles* (384-322) SM yang berkeyakinan bahwa demokrasi adalah supremasi kumpulan masyarakat luas termasuk di antaranya adalah orang-orang miskin. Sebagai ciri pokok demokrasi klasik adalah yang menyangkut tiga nilai dasar yaitu kebebasan, keadilan dan kemerdekaan.

Secara konseptual, demokrasi bukanlah hal yang atau mudah untuk dipahami. Hal ini disebabkan karena demokrasi memiliki banyak konotasi makna. dalam hubungan ini ada makna *variatif*, makna *evolitif* dan *dinamis*. Maka tidaklah mudah untuk membangun atau membuat defenisi yang jelas dan tegas mengenal demokrasi itu. Demokrasi yang bermakna *variatif*, karena sangat bersifat ininterpretatif. Setiap penguasa negara berhak untuk mengklaim negaranya sebagai negara yang demokratis, meskipun prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dianut dalam praktek politik kekuasaannya jauh daripada prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu maka banyak kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi Parlemerter, demokrasi Kerakyatan, demokrasi Pancasila, demokrasi Terpimpin, demokrasi Komunis, demokrasi Proletar yang kesemuanya menggunakan kata demokrasi akan tetapi, maknanya berbeda-beda.

Demokrasi juga merupakan konsep *evolutif* dan *dinamis* dan bukan sebagai konsep yang *statis*. Artinya, demokrasi senantiasa mengalami perubahan-perubahan baik dalam bentuk formalnya maupun dalam substansinya yang sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis di mana konsep demokrasi itu lahir dan berkembang.

Demokrasi itu berkembang secara evolutif, secara perlahan tapi dengan pasti. Maka apa yang dipahami sebagai gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno misalnya tidak harus sesuai dan relevan dengan gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini. Karena alasan inilah pula demokrasi selalu diperdebatkan, apakah demokrasi bersifat universal ataukah bersifat partikular atau lokal (Suhelmi, 2007:297)

Membicarakan demokrasi ternyata tidaklah dapat dilepaskan dari persoalan kekuasaan (*power*) dan negara (*state*). Hal ini disebabkan karena pada dasarnya membicarakan demokrasi adalah masalah yang berkaitan erat dengan hal bagaimana rakyat dalam suatu negara mengelola kekuasaan demi kepentingan bersama. Dalam perjalanan sejarah soal pengelolaan kekuasaan oleh rakyat itu berkaitan erat dengan soal bagaimanakah konsep negara dan konsep kekuasaan muncul di dalam kehidupan berbangsa atau di dalam kehidupan manusia. (Adisusilo, 2007:85). Maka berkenaan dengan hal tersebut, sekalipun demokrasi dengan mudahnya diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Gagasan "*government ruled by the people*" ini yang secara etimologis menyiratkan lebih banyak ketidaksepakatan ketimbang konsensus. *Pertama*, siapakah sebetulnya yang disebut dengan rakyat (*people*) itu? Partisipasi politik semacam apakah yang diperuntukkan kepada mereka? Apa kondisi menguntungkan yang harus ada bagi terwujudnya partisipasi politik? *Kedua*, sejauh manakah dan seberapa luaskah wilayah yang bisa dicakup oleh sebuah kekuasaan yang bersifat demokratis? *Ketiga*, apakah "*government ruled by the people*" harus selalu dipatuhi? Apa mekanisme yang disediakan bagi non-partisan? Apa kondisi yang memungkinkan demokrasi dengan menggunakan cara-cara kekerasan terhadap warganya sendiri atau warga masyarakat lain (Held, 1987:2)

Oleh karena itu timbul perbedaan-perbedaan dalam dua kelompok perdebatan. *Pertama*, kelompok yang mempersoalkan cara atau metoda untuk menciptakan "*government ruled by the people*". *Kedua*, kelompok yang mempermasalahkan kondisi-kondisi apa yang memungkinkan terciptanya atau upaya-upaya untuk membentuk sebuah demokrasi?. Dalam kelompok

perdebatan yang *pertama* bahwa proses terbentuknya demokrasi senantiasa dan seringkali dilihat dengan 4 cara pandang yang berbeda-beda.

1. Cara pandang yang pertama, cenderung melihat demokrasi sebagai institusi politik yang memungkinkan terciptanya “*government ruled by the people*”. Demokratis tidaknya sebuah negara dapat diukur bukan saja berdasarkan kepada ada tidaknya lembaga-lembaga politik, seperti Parlemen, Konstitusi, partai Partai Politik. Akan tetapi juga yang terpenting adalah apakah lembaga-lembaga politik yang dimaksudkan itu dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Untuk itu lembaga-lembaga politik demokrasi harus dilengkapi dengan beberapa proses dan aturan main yang lain seperti misalnya tegaknya *the rule of law*, transparansi, akuntabilitas publik, *saparation of power*, dan konstitusionalisme.
2. Cara pandang yang kedua, menggambarkan demokrasi sebagai metoda politik untuk memilih pemimpin. Dalam pengertian ini demokrasi hampir identik dengan pemilihan umum. Akan tetapi bilamana pemilihan umum dapat dilakukan dengan bebas dan jujur serta adil, demokrasi juga memerlukan beberapa syarat yang lain yakni pengakuan (*recognition*) atas hak dan kebebasan bagi waganegara.
3. Cara pandang yang ketiga, menempatkan demokrasi sebagai hubungan yang berkaitan erat dengan toleransi, menerima dengan terbuka terhadap pluralitas dan menerima dialog sebagai ganti (*substitusi*) tindakan aksi kekerasan.
4. Cara pandang yang keempat, meletakkan demokrasi dalam kerangka perimbangan kekuatan (*balance of power*) terutama antara kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. dalam sejarah awalnya kelas-kelas sosial di masyarakat itu, adalah para tuan-tuan tanah yang melawan kesewenang-wenangan kerajaan. Tetapi kemudian orang sepertinya lebih mempercayai kelas-kelas borjuis merupakan kelas sosial yang paling progresif dalam hal memperjuangkan demokrasi. Namun kepercayaan tersebut mengalami keredupan seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Di sini kelas progresif terdiri dari para pekerja (buruh) dan para petani. Namun dalam perkembangan yang lebih baru, yang disebut sebagai era pasca modernisme (posmo). Demokrasi dalam pengertian perimbangan kekuasaan berkaitan erat dengan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) yang melibatkan kelompok-kelompok marginal yang baru



muncul ke permukaan seperti kelompok-kelompok gerakan perempuan, kelompok-kelompok aktivis lingkungan, kelompok-kelompok homoseksual dan sebagainya (Heriej, 2004:13)

Terkait dengan persoalan di atas, demokrasi tidak bisa tidak, bicara soal kekuasaan (*power*) dan negara (*state*). Sebab, pada dasarnya bicara soal demokrasi, adalah soal bagaimana rakyat itu dalam suatu negara mengelola kekuasaan untuk kepentingan bersama.

Dalam suasana demokratis tentu ada pandangan dan pendapat yang saling bertentangan dapat dikemukakan dengan bebas, sehingga pengambilan keputusan politik menjadi berkeadilan, yang menyebabkan tumbuhnya suasana kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Ketiga komponen ini saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada kesejahteraan tanpa terlebih dahulu dilalui oleh proses politik yang berkeadilan dan tidak ada keadilan tanpa tumbuhnya demokrasi.

Dalam demokrasi terdapat dua aliran yang dianggap paling penting. *Pertama* adalah demokrasi konstitusional dimana pemerintah terbatas kekuasaannya, sebuah Negara Hukum, dan yang bersifat *rule of law*. *Kedua* adalah demokrasi yang berdasar pada Marxisme-Leninisme di mana pemerintah tidak boleh dibatasi kekuasaannya, serta bersifat totaliter. Aliran yang pertama merupakan pengertian demokrasi yang kita kenal secara umum sekarang ini.

Adapun liberalisme dalam demokrasi sebagai aliran pemikiran ketatanegaraan dan liberalisme ekonomi, menghendaki bahwa pemerintahan harus demokratis dan tidak boleh mencampuri urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi harus dijamin sebebaskan-bebasnya oleh pemerintah. Dalam aliran Liberalisme Klasik, negara ditempatkan sebagai penjaga yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit. Tetapi dalam aliran Liberalisme Modern, negara dianggap turut bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya oleh karena itu harus turut utuk menyejahterakan rakyatnya. Pemikiran ini dimasukkan ke dalam konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Namun dewasa ini baik demokrasi konstitusional maupun demokrasi liberal modern dalam praktiknya tidak berbeda secara substansial. Karena keduanya sama-sama mengusung azas kesamaan dan kesederajatan dalam kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif dan legislatif, maupun kekuasaan yudikatif.

Dengan demikian masyarakat internasional mendukung demokrasi sebagai sistem sosial politik yang mengedepankan aspek musyawarah atau aspirasi mayoritas dalam suatu komunitas yang paling pas dan sistem-sistem yang ada untuk menciptakan kesederajatan dalam pola-pola kekuasaan dalam suatu negara. Karena itu tujuan bersama dalam berdemokrasi itu tentunya kesejahteraan rakyat yang merata dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Kalaupun tujuan akhir itu tidak tercapai, maka demokrasi itu sendiri sebenarnya sudah merupakan kesejahteraan karena hak rakyat untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dapat terjamin.

Karena itu persoalannya sekarang ini, bagaimana sistem, model, dan mekanisme serta cara mewujudkan demokrasi itu?

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (*eksekutif, yudikatif dan legislatif*) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independent*) dan berada dalam peningkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah

1. Lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan *eksekutif*,
2. Lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan *judikatif*
3. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan *legislatif*.

Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Sistem politik yang berazaskan demokrasi pada saat ini telah dipakai sebagai sistem politik yang paling diminati oleh masyarakat dunia, dimana sekitar 119 negara menganut sistem ini dalam tata kenegaraannya. Namun bila melihat angka tersebut maka sekitar 62% negara di dunia telah menganggap demokrasi sebagai sistem politik yang paling ideal bagi negara mereka.

Dalam prosesnya, partai dalam suatu negara demokratis yang telah memenuhi kedua fungsinya, yakni mengatur kehendak umum dan mendidik warga negara untuk bertanggungjawab secara politik, maka selanjutnya partai tersebut memerankan tugasnya yakni menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Karena sistem demokrasi merupakan piramida yang dibangun dan dasarnya, hubungan antara pemimpin dan pengikut merupakan suatu keharusan dalam komunikasi dua arah yang ada dalam sistem demokrasi itu. Merupakan tugas utama dan partai untuk menjaga agar saluran komunikasi itu tetap terbuka dan jelas. Tugas seperti itu menjadikan partai, kalau tidak sebagai penguasa, sekurang-kurangnya sebagai pengendali pemerintah dalam suatu negara demokrasi perwakilan.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dan rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia.

Ketika istilah demokrasi telah banyak dipraktekkan, kini demokrasi bisa disebut sebagai sarana pemerintah untuk merepresentasikan keinginannya dalam mengontrol rakyat untuk melakukan sesuatu atas nama dan di bawah tanggung jawab pemerintah. Karena itu, *Woodrow Wilson* Presiden Amerika Serikat selama Perang Dunia I, menyatakan dengan lantang untuk menyelamatkan dunia dengan demokrasi, ia berpendapat bahwa demokrasi diperlukan agar masyarakat lebih dewasa, dalam arti matang secara pemikirannya.

*Leislie Lipson* menyatakan bahwa demokrasi adalah upaya untuk membangun masyarakat berbudaya (*civilization*), yang ditentukan oleh bagaimana menyusun keharmonisan hubungan-hubungan dan kelompok-kelompok sehingga tujuan untuk menciptakan kebebasan, persamaan, dan keadilan dapat diwujudkan.

Pada kenyataannya demokrasi mengandung dilema-dilema sendiri yang mempersulit proses implementasi demokrasi itu sendiri.

*Pertama*, dalam perwujudan nilai demokrasi adalah mengenai status pluralitas sosial masyarakat dan hubungannya dengan demokrasi. Dalam

sistem demokrasi diyakini bahwa keragaman masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Karena itu pemerintah harus berperan untuk melindunginya. Faktor keragaman masyarakat yang dapat menjadi determinan adalah ras, agama, bahasa, dan sebagainya sehingga jelas bahwa kondisi sosial dapat mempengaruhi demokrasi. Karena itu demokrasi sebagai variabel penyebab dalam hubungan kausalitas yang kompleks karena demokrasi menyebabkan kondisi sosial masyarakat dapat berkembang.

*Kedua* adalah menyangkut demokrasi sebagai seperangkat nilai ideal yang Ingin dituju tetapi sekaligus sebagai suatu cara mengenai bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Nilai-nilai tersebut adalah kebebasan dan kesamaan atau keadilan. Karena itu demokrasi dapat menjadi seperangkat nilai yang merupakan tujuan (akibat) tetapi juga berarti seperangkat aturan untuk mencapai tujuan (penyebab).?

*Ketiga* adalah menyangkut nilai yang terkandung dalam demokrasi. Di satu sisi demokrasi menginginkan kebebasan dan individualisme, terutama untuk melindungi kelompok minoritas dan tekanan pemerintahan/tirani mayoritas. Kecenderungan untuk melindungi kepentingan dan kebebasan individu akan membatasi kekuasaan negara, terutama dalam masyarakat plural, hal ini akan menjadi faktor yang signifikan dalam upaya implementasi demokrasi. Batas antara kebebasan individu dan kesamaan atau keadilan inilah yang dalam praktek sulit diterapkan.

Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi seperti dijelaskan di atas memiliki beberapa faktor seperti faktor sejarah, etnis, agama, bahasa, geopolitik, dan ekonomi. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Faktor Sejarah.** Dengan revolusi di tiga Negara Barat, yaitu Revolusi Agung (*Glorious Revolution*) di Inggris pada tahun 1215, Revolusi Kemerdekaan di Amerika pada tahun 1778 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789, *Lipson* secara tidak langsung mengatakan bahwa revolusi merupakan titik awal yang menandai kehidupan demokrasi di ketiga Negara Barat tersebut. Dengan kata lain faktor sejarah ingin menunjukkan bahwa demokrasi ternyata tumbuh melalui revolusi, namun berkembang secara evolusioner.
- b. **Faktor Etnis, Agama, dan Bahasa.** Demokrasi sangat sulit berkembang di negara-negara yang masyarakatnya memiliki perbedaan etnis, agama, dan bahasa. Karena itu menurut *Lipson* satu-satunya cara untuk mengembangkan sikap toleran dan persamaan adalah dengan

pemberlakuan undang-undang yang secara keras mengenai persamaan hak dan kewajiban warganegara.

- c. **Faktor Geopolitik.** *Lipson* melihat adanya hubungan signifikan antara geopolitik dan pertumbuhan/perkembangan demokrasi. Menurut *Lipson* terdapat kecenderungan perkembangan demokrasi di negara-negara yang memiliki angkatan laut yang dominan dibandingkan di negara-negara dengan angkatan darat yang dominan. Dengan kata lain negara yang memiliki angkatan darat dominan memberi kontribusi terhadap proses demokrasi. Hal ini dapat ditelusuri dari tingginya kecenderungan minat politik dan intervensi militer angkatan darat dibanding dengan militer angkatan laut.
- d. **Faktor Ekonomi.** Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi juga sangat terkait dengan faktor ekonomi. Dua aspek ekonomi, yaitu distribusi kekayaan yang relatif merata dan subordinasi swasta di bawah kepentingan publik yang lebih luas merupakan kondisi yang dapat memberi ruang bagi perkembangan dan pertumbuhan demokrasi.

Nilai-nilai murni yang diusung demokrasi bertujuan untuk membentuk kebebasan persamaan hak manusia, secara politis dan sosial. Hal terpenting yang harus dilakukan dalam rangka mensosialisasikan demokrasi kepada masyarakat adalah dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu tujuan demokrasi bagi masyarakat.

## **B. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM SOSIAL INDONESIA**

Untuk membahas demokrasi sebagai sistem sosial di Indonesia, maka dapat diawali dengan membahas masalah keadilan dan kesejahteraan. Menurut kamus Indonesia kata adil diartikan: tidak berat sebelah (tidak memihak), sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sementara kesejahteraan bukan sebuah konsep yang berdiri sendiri, namun kesejahteraan adalah sebuah akibat yang baik dan seluruh komponen politik yang melingkupinya, yakni demokrasi dan berkeadilan. Karenanya, kata kesejahteraan biasanya bergandengan dengan kata keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan itu bukan konsep yang mandiri melainkan terkait dengan konsep sebelumnya, yakni keadilan.

*Murtadha Muthahari*, seorang penulis Islam Iran mengartikan keadilan itu adalah memelihara hak orang lain, yang berkaitan dengan medan dan

wilayah perbuatan manusia. Ia kemudian merinci bentuk-bentuk keadilan dalam empat hal:

*Pertama*, adil adalah keadaan sesuatu yang seimbang. Keseimbangan ini mesti didukung dengan faktor-faktor yang lain, berupa aktivitas-aktivitas, entah itu aktivitas politik, aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas hukum hingga aktivitas kebudayaan. Keseimbangan yang lahir dari aktivitas tersebut akan melahirkan satu keadilan yang diharapkan.

*Kedua*, keadilan ialah persamaan terhadap pembedaan apa pun, dalam hal ini memberikan hak memiliki yang sama.

*Ketiga*, keadilan ialah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

*Keempat*, keadilan ialah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi manusia dalam kehidupan. Karena itu, memberikan kebebasan dan juga kelonggaran terhadap manusia dalam bereksistensi adalah satu kewajiban bagi mereka yang ada di sekitarnya.

Franz Magnis mengartikan keadilan harus mencukupi segala aspek. Adil pada hakekatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Pada hakekatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasar keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Dalam bahasa lain, dinyatakan bahwa pada umumnya keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dan kekayaan kita bersama.

Bumi yang kita pijak adalah milik kita bersama, sudah sewajarnya kalau secara bersama pula kita merasakannya. Kekayaan kita bersama adalah bumi, dan itu mesti dirasakan oleh semua manusia. Merasakan kekayaan secara bersama-sama merupakan hidup bersosial yang tinggi dan itu dapat menjamin keadilan yang riil. Keadilan yang nyata mesti melalui proses yang nyata pula, proses itu akan diseleksi oleh masyarakat dan proses itu tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial, politis, ideologis, dan budaya.

Dalam proses itulah kekayaan akan kita rasakan secara bersama dan setiap manusia mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam kekayaan itu.

Hak dalam menikmati kekayaan merupakan keinginan semua manusia, tetapi mereka juga wajib menjaga kekayaan agar tetap lestari dan terus berkesinambungan dengan keadilan. Keadilan mempunyai kedudukan sentral dalam sistem hukum. *Poespowardojo* menyatakan bahwa keadilan adalah

intersubjektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hubungan masyarakat. Hakekat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebakuannya dan selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya.

Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk, yaitu:

1. *Justitia Commutativa*, sejauh merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat.
2. *Justitia Distributiva*, sejauh merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu.
3. *Justitia Legalis*, sejauh menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.

Selain itu keadilan juga menuntut adanya perlakuan dan pelaksanaan hukum secara objektif, selain itu undang-undang juga pada hakikatnya mencerminkan keadilan dirumuskan dengan melibatkan masyarakat melalui perwakilannya. Hal ini mencerminkan demokrasi yang sewajarnya dilakukan bukan saja untuk rakyat, melainkan juga elit masyarakat, namun masalah elitisme dapat menghambat proses perwujudan itu dan kalau dibiarkan demikian, maka keadilan sebagai tujuan dapat menjadi kabur.

Mereka yang merasa dirinya berasal dan kalangan atas seringkali mengaburkan apa yang menjadi keinginan bersama, karena itu sering juga keadilan dikaburkan oleh kalangan-kalangan elit, walaupun pada dasarnya mereka jauh lebih tahu akan arti keadilan.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa keadilan mengatur hubungan antar manusia. Manusia sebagai individu mempunyai hak-haknya sendiri, sebaliknya masyarakat juga mempunyai hak-hak dan tujuannya sendiri, yaitu kesejahteraan umum, kesejahteraan bagi semua warga masyarakat.

Karena itu, keadilan mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak itu, dan melarang kita untuk melanggarnya atau merampasnya. Menghormatinya adalah adil dan melanggar atau merampasnya adalah tindakan ketidakadilan.

### C. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK INDONESIA

*Henry B. Mayo* dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi system politik yang demokratis sebagai berikut:

Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic election which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Di samping itu bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu system pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral.

Dalam persepsi ini dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). *Henry B. Mayo* telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang dirinci itu, tetapi tergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Di bawah ini diutarakan beberapa nilai yang mendasari demokrasi yang dirumuskan oleh *Henry B. Mayo*:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Kalau golongan-golongan yang berkepentingan tidak mampu mencapai kompromi, maka ada bahaya bahwa keadaan semacam ini akan mengundang kekuatan-kekuatan dan luar untuk campur tangan dan memaksakan dengan kekerasan tercapainya kompromi atau mufakat.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*). Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi



perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan, dan sebagainya. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perubahan-perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendali. Sebab kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokratis tidak dapat berjalan, sehingga timbul sistem diktator.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*). Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri, atau pun melalui *coup d'etat*, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif; mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*) yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut suatu gaya hidup (*way of life*). Tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab di samping keanekaragaman diperlukan juga persatuan serta integrasi.
6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil.

Oleh karena itu untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.

2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol), memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi-partai, multi-partai). Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Namun kritik terhadap demokrasi akan selalu muncul, karena demokrasi mengandung kelemahan-kelemahan, akan tetapi demokrasi juga mengandung kekuatan dan kebaikan, yaitu bahwa demokrasi memperkuat harga diri manusia, menyediakan kesempatan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus (mempertinggi budaya politik). Kesempatan pendidikan kewarganegaraan membuat masyarakat akan menjadi semakin berbudaya. Negara yang merespon terhadap kebutuhan penduduknya dan membantu meningkatkan standar hidup menjadi lebih baik adalah sebagai pendidikan bagi mereka untuk melihat demokrasi. Karena itulah kekuatan negara pun diperoleh dan rakyat.

#### **D. ORDE REFORMASI DAN HARAPAN BERDEMOKRASI YANG SESUNGGUHNYA.**

Kejatuhan Presiden Soeharto yang mendadak dan tak teramalkan menyebabkan munculnya jurang legitimasi yang menganga lebar, sebagaimana tercermin dan berbagai hujatan yang meluas terhadap berbagai lembaga dan prosedur politik yang digunakan oleh Presiden Soeharto selama berkuasa, maka B.J. Habibie, yang diangkat menjadi presiden di awal reformasi berusaha menjembatani jurang legitimasi ini dengan menawarkan pemilu demokratis, pers bebas, kebebasan berorganisasi serta desentralisasi pemerintahan. Namun karena kondisi kesejarahan bangsa dalam

berdemokrasi itu sangat melelahkan, dan dengan jurang legitimasi politik yang menganga lebar itu, momen ini kurang mendapat sambutan dengan yang sebenarnya. Euforia politik tampak sangat mempengaruhi alam demokrasi secara berlebihan. Namun begitu, presiden di awal reformasi ini telah secara baik meletakkan berbagai lembaga dan prosedur demokrasi di negeri ini.

Di awal peminintahan B.J. Habibie menghadapi tiga tantangan struktural. *Pertama*, format sistem pemilu harus seperti apa? Haruskah Sistem Proporsional yang digunakan oleh Orde Baru, yang juga digunakan dalam pemilu demokratis pada 1955, dipertahankan atau diganti dengan Sistem Distrik atau sistem lainnya? *Kedua*, apakah pembagian kekuasaan yang membingungkan antara presiden dan lembaga perwakilan, sebagaimana yang tencantum dalam UUD 1945 dipertahankan, atau diubah dan dipentegas menjadi sistem presidensil murni atau sistem parlementer murni. Akhirnya, *ketiga*, bagaimana pemerintah harus menyusun kembali hubungan pusat-daerah?

Kegamangan-kegamangan politik yang bercermin pada praktik berdemokrasi di masa lalu itu akhirnya bisa dilalui secara baik. *R. William Liddle* mengakui bahwa sejak reformasi pada tahun 1998, bangsa Indonesia dalam pengalaman berdemokrasi telah mengalami peningkatan substansial. Telah terjadi beberapa perubahan struktural dalam politik Indonesia sejak saat itu, terutama dalam karakteristik pemilu serta hubungan antara presiden dan legislatif. Namun, keprihatinan terhadap isu—isu mengenai akuntabilitas legislatif terhadap para pemilih dan keseimbangan demokratis yang seharusnya ada antara kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berkembang sejak 1998 masih sangat relevan.

Otoritas pemerintah pusat telah dikurangi oleh undang-undang. Walaupun mungkin malah menimbulkan lebih banyak kekhawatiran baru daripada menyelesaikan masalah, misalnya undang-undang otonomi daerah, jika tidak dibatasi, barangkali akan memunculkan raja-raja kecil di daerah, dan mungkin akan mengancam keutuhan NKRI.

Karena itu, di era reformasi dewasa ini nilai-nilai demokrasi telah diterapkan hampir di semua sistem dan lembaga-lembaga demokrasi di negeri ini. Dan yang terpenting dan semua sistem demokrasi itu adalah mencegah datangnya kembali seorang tokoh kuat dan penguasa tunggal untuk selamanya berkuasa. Kita pernah belajar bagaimana demokrasi dipimpin di zaman Orde Lama, yang sesungguhnya menghancurkan nilai-

nilai demokrasi itu sendiri. Demikian pula, atas nama Demokrasi Pancasila, seorang Presiden mampu menghitamputihkan bangsa ini dengan sedemikian lamanya.

Tentu pengalaman-pengalaman itu kita jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk ke depan dalam mempraktikkan demokrasi yang lebih sempurna. Kunci kesempurnaan dalam berdemokrasi itu adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di dalam bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu. Dan itulah yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholish Madjid, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu adalah hak dan kewajiban manusia Indonesia, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di dalam bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, partisipasi masyarakat dapat mengantarkan kepada perwujudan seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan, sebagaimana dinyatakan di dalam nilai-nilai kesepakatan luhur dalam Mukaddimah UUD 1945.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
- 2) Jelaskan makna demokrasi sebagai sistem sosial Indonesia!
- 3) Jelaskan tentang sistem politik yang berdemokratis menurut *Henry B. Mayo!*
- 4) Jelaskan apa kekuatan dan kebaikan dari demokrasi!
- 5) Jelaskan tentang kunci kesempurnaan berdemokrasi masyarakat Indonesia pada era reformasi sekarang ini!

*Petunjuk jawaban latihan*

- 1) Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

- 2) Demokrasi sebagai sistem sosial tidak terlepas dari masalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dimana keadilan mengatur hubungan antar manusia. Manusia sebagai individu mempunyai hak-haknya sendiri, sebaliknya masyarakat juga mempunyai hak-hak dan tujuannya sendiri, yaitu kesejahteraan umum, kesejahteraan bagi semua warga masyarakat.
- 3) Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik
- 4) Kekuatan dan kebaikan demokrasi, yaitu bahwa demokrasi memperkuat harga diri manusia, menyediakan kesempatan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus (mempertinggi budaya politik)
- 5) Kunci kesempurnaan dalam berdemokrasi itu adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di dalam bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu. Dan itulah yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.



## RANGKUMAN

---

- 1) Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- 2) Membicarakan demokrasi ternyata tidaklah dapat dilepaskan dari persoalan kekuasaan (*power*) dan negara (*state*). Hal ini disebabkan karena pada dasarnya membicarakan demokrasi adalah masalah yang berkaitan erat dengan hal bagaimana rakyat dalam suatu negara mengelola kekuasaan demi kepentingan bersama.
- 3) Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (*eksekutif, yudikatif dan legislatif*)
- 4) *Leislie Lipson* menyatakan bahwa demokrasi adalah upaya untuk membangun masyarakat berbudaya (*civilization*), yang ditentukan oleh bagaimana menyusun keharmonisan hubungan-hubungan dan kelompok-kelompok sehingga tujuan untuk menciptakan kebebasan, persamaan, dan keadilan dapat diwujudkan.

- 5) Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi memiliki beberapa faktor seperti faktor sejarah, etnis, agama, bahasa, geopolitik, dan ekonomi.
- 6) Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Indonesia berhubungan dengan masalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.
- 7) Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tokoh yang berpendapat *Arsitoteles* (384-322) SM yang berkeyakinan bahwa demokrasi adalah supremasi kumpulan masyarakat luas termasuk di antaranya adalah orang-orang miskin. Sebagai ciri pokok demokrasi klasik adalah yang menyangkut tiga nilai dasar yaitu kebebasan, keadilan dan kemerdekaan, adalah.....
  - A. Aristoteles
  - B. Plato
  - C. Socrates
  - D. August Comte
- 2) Demokrasi senantiasa mengalami perubahan-perubahan baik dalam bentuk formalnya maupun dalam substansinya yang sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis di mana konsep demokrasi itu lahir dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memiliki sifat.....
  - A. Variatif
  - B. Revolusi
  - C. Dinamis
  - D. Statis
- 3) Cara pandang yang meletakkan demokrasi dalam kerangka pertimbangan kekuatan terutama antara kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat adalah.....
  - A. Government ruled by the people
  - B. Separation of power

- C. Recognition
  - D. Balance of power
- 4) Demokrasi dimana pemerintah terbatas kekuasaannya, sebuah negara hukum, dan yang bersifat Rule of Law merupakan demokrasi.....
- A. Liberal
  - B. Konstitusional
  - C. Marxisme
  - D. Pancasila
- 5) Negara yang memiliki angkatan darat lebih dominan memberi kontribusi terhadap proses demokrasi. Hal ini dapat ditelusuri dari tingginya kecenderungan minat politik dan intervensi militer angkatan darat dibanding dengan militer angkatan laut. Pernyataan ini menunjukkan dominasi factor yang mempengaruhi suatu masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi.
- A. Faktor sejarah
  - B. Faktor Etnis
  - C. Faktor Geopolitik
  - D. Faktor Ekonomi
- 6) Tokoh yang berpendapat bahwa demokrasi diperlukan agar masyarakat lebih dewasa, dalam arti matang dalam cara berpikrinya adalah.....
- A. Franz Magnis
  - B. Heriej
  - C. Leslie Lipson
  - D. Woodrow Wilson
- 7) Demokrasi sebagai sistem sosial di Indonesia berkaitan dengan masalah.....
- A. Keadilan dan kekuasaan
  - B. Keadilan dan kesejahteraan
  - C. Keadilan dan HAM
  - D. Keadilan dan keberpihakan
- 8) *“A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic election which are conducted on the principal of political equality and under conditions of political freedom”* merupakan demokrasi sebagai sistem politik yang dikemukakan oleh.....
- A. Henry B. Mayo
  - B. Murtadha Muthahari

- C. Franz Magnis  
D. Heriej
- 9) Menurut Henry B. Mayo bahwa demokrasi memiliki nilai-nilai dasar, diantaranya menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- A. *Minimum of coercion*  
B. *Orderly succession of rulers*  
C. *Institutionalized peaceful settlement of conflict*  
D. *Peaceful change in a changing society*
- 10) Kunci kesempurnaan dalam berdemokrasi itu adalah.....
- A. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama di dalam bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu  
B. Adanya kesempatan pendidikan kewarganegaraan yang membuat masyarakat menjadi semakin berbudaya  
C. Adanya respon masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  
D. Adanya sistem peradilan yang bebas dan memihak

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.



## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) B
- 2) C
- 3) C
- 4) B
- 5) A
- 6) C
- 7) B
- 8) C
- 9) D
- 10) C

### *Tes Formatif 2*

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) A
- 5) B
- 6) D
- 7) B
- 8) A
- 9) D
- 10) B

### *Tes Formatif 3*

- 1) A
- 2) C
- 3) D
- 4) B
- 5) C
- 6) D
- 7) B
- 8) A
- 9) B
- 10) A

## Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. (1990). *Budaya Politik, Tingkah Laku, dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Chambers, Robert Pengantar: M. Dawam Raharjo (1987). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3S.
- Duverger, Maurice (1985). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Hungtington, Samuel P. and Joan M. Nelson (1990). *Partisipasi Politik di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat (1984). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Kusnaedi (1995). *Membangun Desa, Pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa*. Penerbit Penebar Swadaya.
- Leislie Lipson, The Democratic Civilization, New York, Feiffer and Simon, 1964
- Miriam Budiarto (1983). *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Mohtar Mas'oeid (1993). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais, Jakarta; Teraju, 2004
- Rodee, Charlton Clymer (1993). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip (1986). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Sumitro Maskun (1995). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Penerbit Yogyakarta: Media Widya Mandala.